

PEMIKIRAN Ir. SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM

OLEH :

SRI PUJI WAHYUNI

NIM : 9637 2529

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag
2. Drs. H. ABDUL MAJID. AS

**JURUSAN JINAYAH SIYASYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2002

ABSTRAK

SRI PUJI WAHYUNI – NIM. 96372529, PEMIKIRAN IR. SOEKARNO TENTANG DEMIKRASI. YOGYAKARTA: FAKULTAS SYARI'AH, UIN SUNAN KALIJAGA, 2002

Sejarah gagasan Soekarno tentang demokrasi seluruhnya bertema sentral tentang persatuan. Ideologi Pancasila dan konsep Nasakom yang digagasnya merupakan manifestasi keinginannya untuk selalu mempersatukan bangsa Indonesia. Soekarno tidak setuju dengan demokrasi liberal dengan system parlementer seperti yang pernah diterapkan. Kerangka itu justru membuat bangsa dalam keadaan tidak menentu, bermusuhan satu sama lain, dan perjuangannya sangat sektarian.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitik, Adapun pengumpulan datanya bersumber dari data primer dan sekunder, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum rasionalistik, yang dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induksi.

Gagasan Soekarno tentang idealitas konsep demokrasi yaitu tata social, politik dan ekonomi yang anti elitism, kapitalisme dan imperialism, serta member kesempatan kepada rakyat dalam peran politik dan ekonomi. Gagasan ini oleh Soekarno sendiri dinamakan sosio-demokrasi, dimana aplikasi demokrasi yang relevan di Indonesia menurut Soekarno yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi asas gotong royong (persatuan) dalam membangun bangsa dengan system pemerintahan dipimpin atas dasar permusyawaratan/perwakilan.

Kata kunci: **pemikiran, Soekarno, demokrasi**

Drs. HAMIM ILYAS, M.Ag
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal: *Skripsi*

Saudari Sri Puji Wahyuni

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di – Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi Saudari Sri Puji Wahyuni yang berjudul "**Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Demokrasi**" ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Tsani 1423 H
27 Juni 2002 M

Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

Drs. H. ABDUL MAJID, AS
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOTA DINAS

Hal : *Skripsi*

Saudari Sri Puji Wahyuni

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di - Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengadakan perubahan seperlunya, selaku pembimbing saya berpendapat skripsi Saudari Sri Puji Wahyuni yang berjudul "**Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Demokrasi**" ini telah dapat diajukan ke depan sidang munaqasah, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Rabi'ul Tsani 1423 H
27 Juni 2002 M

Pembimbing II



Drs.H. Abd. Majid. AS
NIP. 150 192 830

PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul

“Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Demokrasi”

Yang Disusun Oleh :

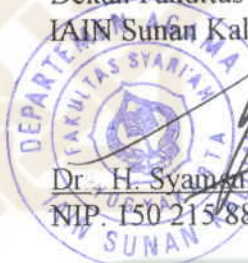
Sri Puji Wahyuni

NIM : 96372529

Telah dimunaqsyahkan didepan sidang munaqsyah pada tanggal 8 Juli 2002 M / 27 Rabiul Tsani 1423 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam.

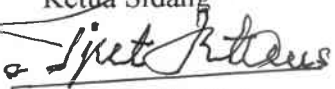
Yogyakarta, 15 Jumadil Ula 1423 H
24 Juli 2002 M

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

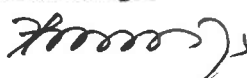

Dr. H. Syamsul Anwar MA
NIP. 150 215 881

Panitia Munaqsyah


Ketua Sidang


Dra. Hj. Tjut Intan
NIP. 150 010 453

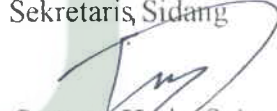
Pembimbing I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

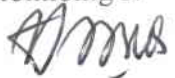
Penguji I


Drs. Hamim Ilyas, M.Ag
NIP. 150 235 955

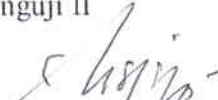
Sekretaris Sidang


Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag
NIP. 150 289 263

Pembimbing II


Drs. H. Abdul Majid
NIP. 150 192 830

Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si
NIP. 150 256 649

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله اللهم

صل على محمد وعلى آل محمد

Syukur Alhamdulillah, dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islam serta karuniaNya selama ini yang telah dicurahkan kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dan tersusun dengan baik.

Penyusunan skripsi dengan judul **“Pemikiran Ir. Soekarno Tentang Demokrasi”** ini disusun sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penyusun menghadapi beberapa hambatan dalam pengolahan data yang akurat melalui penelitian yang bersumber pada kepustakaan (*library research*). Mengingat data yang diolah dari jenis penelitian ini sangat kompleks dan perlu dipadukan dengan tipe penelitian *descriptif analysis* sehingga harus dengan teliti mengolah data secara kongkrit sesuai dengan tujuan penulisan yang hendak dicapai.

Faktor penghambat lainnya, yaitu berupa keterbatasan literatur yang dimiliki oleh penyusun. Disamping koleksi buku tentang Soekarno yang dimiliki oleh beberapa perpustakaan sangat terbatas, disisi lain referensi yang tersedia di

perpustakaan pusat IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kurang mendukung, sebab kalau pun koleksi buku itu ada, hampir secara keseluruhan hanya mengangkat tema tentang perjalanan hidup Soekarno secara umum sedangkan referensi buku yang berbicara langsung tentang demokratisasi Soekarno sangat terbatas.. Oleh sebab itu secara kongkrit, literatur yang dimiliki oleh penyusun sangat minim. Tapi Alhamdulillah, dengan kemauan yang keras dan dukungan dari berbagai pihak, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini tanpa meyampingkan berbagai muatan isi yang terkandung berdasarkan judul yang diangkat.

Melalui kesempatan ini tidak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. HM. Amin Abdullah selaku Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Drs. Hamim Ilyas, M.Ag dan Drs H. Abdul Majid.AS, sebagai pembimbing yang telah memberikan arahan, maupun bimbingan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, khususnya Dr. Drs. H. Abd. Salam Arief, MA selaku penasehat akademik yang telah membantu memberikan arahan selama studi.
5. Keluarga Besar KSR PMI Cabang Kota Yogyakarta, khususnya teman-teman KSR PMI Unit VII IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan motivasi dan masukan yang berarti selama penyusunan skripsi ini.

6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu baik moril maupun spirituil.

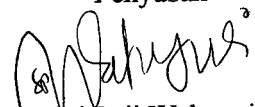
Teriring doa semoga amal ibadah yang telah dilakukan akan mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan senantiasa diberikan pengetahuan ilmu yang bermanfaat untuk kemajuan serta perkembangan Islam dimasa yang akan datang, khususnya untuk kemjuan pengembangan disiplin ilmu hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam penguasaan ide, pola berpikir maupun pengetahuan yang dimiliki untuk dapat memberikan yang terbaik dalam penyusunan skripsi ini. Sehingga masukan atau saran dan kritikan yang konstruktif sangat diharapkan oleh penulis demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, dengan harapan yang sangat besar mudah - mudahan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang sistem demokrasi yang pernah diterapkan di negara ini, dan memahamai salah satu bentuk pemikiran seorang tokoh nasional dengan berbagai bentuk pemikirannya terhadap sistem perpolitikan negara Indonesia. Khususnya untuk menciptakan para pemikir yang Islami, handal dan profesional seiring dengan kemajuan zaman dan perubahan masyarakat Islam yang semakin kompleks dewasa ini.

Yogyakarta, 27 Juni 2002

Penyusun


Sri Puji Wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Tehnik Penulisan.....	20
H. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II : BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG	
 IDEOLOGI POLITIK	24
A. Biografi Kehidupan.....	24

B. Soekarno Sebagai Tokoh Islam Nasionalis.....	32
C. Sumber Pemikiran.....	41
D. Konsepsi Pemikiran Soekarno tentang Ideologi Politik	46
1. <i>Nasakom</i>	46
2. <i>Pancasila</i>	51
BAB III : PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG DEMOKRASI	57
A. Pemikiran Soekarno Tentang Idealitas Demokrasi	57
B. Pemikiran Soekarno Tentang Suksesi, Pembagian Kekuasaan dan Bentuk Pemerintahan	63
BAB IV : APLIKASI DEMOKRASI YANG IDEAL MENURUT SOEKARNO	81
A. Menjunjung Tinggi Asas Gotong Royong	81
B. Hubungan Terpisah Antara Agama (Islam) dengan Negara	84
BAB V : PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran.....	98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I : Terjemahan

Lampiran II : Biografi Tokoh

Lampiran III : Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah pemerintahan rakyat, yaitu pemerintahan yang memberi hak kepada semua rakyat untuk ikut memerintah, atau dapat diartikan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.¹⁾ Definisi lain dari istilah demokrasi adalah suatu struktur pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi yang terdapat di negara-negara Barat agak berbeda dengan batasan demokrasi yang melembaga di negara-negara sedang berkembang. Sejumlah negara Barat seperti Amerika Serikat, Kanada dan Inggris sering menjadi rujukan atau sumber referensi ketika membicarakan tentang sistem pemerintahan yang demokratis di dunia.

Gagasan-gagasan demokrasi yang bersumber dari budaya dan hasil pemikiran dunia Barat berkembang dan menjadi sumber rujukan dunia Timur dalam praktik politik kenegaraan sebab gagasan demokrasi tersebut telah meluas di seluruh dunia. Gagasan ini dalam sejarahnya tidak seluruhnya disambut baik oleh para politikus, teoretikus ilmu politik maupun para negarawan di dunia sebab istilah demokrasi merupakan sebuah istilah yang kabur atau tidak konkret. Penyebab penting dari

¹⁾ Masdar Farid Mas'udi, "Demokrasi Dan Islam", dalam Mashur Amin (ed.), *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta : LKPSM, 1993) hlm. 3

kekacauan tentang pengertian demokrasi ini adalah karena demokrasi telah mengalami perkembangan beribu tahun lamanya dan berasal dari berbagai sumber.

Pengertian demokrasi yang berkembang saat ini tidak sama dengan gagasan awalnya sebab telah mengalami perkembangan walau pengertian yang mendasar adalah sama yakni kedaulatan di tangan rakyat. Gagasan demokrasi yang lahir di Yunani, Romawi, zaman pertengahan dan renaissans, telah bercampur dengan gagasan yang terdapat pada abad-abad berikutnya sehingga menghasilkan beraneka ragam teori dan praktek yang seringkali amat saling bertentangan.²⁾

Kehidupan demokrasi mempunyai dua sisi; *Pertama*, sisi formal legalistik yaitu merupakan aturan main dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang dapat juga terwujud dengan melihat struktur (kekuasaan) yang ada. *Kedua*, sisi aktual yaitu kehidupan riil warga negara dalam bermasyarakat dan bernegara. Sisi pertama sangat bersifat elitis, dan lebih merupakan bidang garap dan kewenangan dari sekelompok kecil elite politik, sehingga secara langsung masyarakat luas tidak dapat berbuat banyak untuk mempengaruhi proses penentuan kebijakan yang ada. Sedangkan sisi kedua lebih mencakup segenap kehidupan masyarakat dalam kehidupan sosial dan bernegara, sehingga semua anggota masyarakat dapat berbuat banyak bagi upaya pengembangan kehidupan kearah yang lebih demokratis.³⁾

²⁾ Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya* (Jakarta: Yayasan Obor, 1992), hlm. xii.

³⁾ Masdar Farid Mas'udi, "Demokrasi Dan Islam", dalam Mashur Amin (ed.), *Agama, Demokrasi.*, hlm. vi - vii

Kajian historis menunjukkan banyak fakta adanya kekuasaan politik negara bangsa diwarnai oleh perjuangan keras dan perebutan kekuasaan yang disertai pertumpahan darah. Hal ini diantaranya disebabkan oleh berbagai perbedaan ideologi politik yang berkembang di masyarakat dan belum ada suatu demokrasi yang ideal dalam kehidupan negara tersebut.

Esensi dari demokrasi menurut Z.A. Maulani ialah, kedaulatan ada di tangan rakyat. Paham demokrasi memposisikan rakyat sebagai sumber kedaulatan dan penyelenggaraan kedaulatan.⁴⁾ Pengertian ini sama dengan makna inti demokrasi menurut Soekarno, bahwa inti demokrasi adalah pemerintahan rakyat.⁵⁾ Secara etimologis, arti demokrasi ini diambil dari pemerintahan Yunani pada abad 9 SM dari kata “demos” yang berarti rakyat dan “kratos” yang berarti pemerintahan.⁶⁾

Sejarah demokrasi di Indonesia adalah strategi untuk memerdekakan bangsa dari penjajah (imperialisme-kapitalisme) dan mengangkat harga diri bangsa. Hal ini berbeda dengan demokrasi Barat yang berasal dari revolusi Perancis yang menempatkan rakyat menjadi instrumen politik kaum borjuis menuju kekuasaan pemerintah. Latar belakang demokrasi yang dipraktikkan dunia Barat pada saat itu dan atau sampai sekarang ini adalah perjuangan golongan borjuis yang berkeinginan

⁴⁾ Z.A. Maulani, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: CRDS Kalimantan-Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 53.

⁵⁾ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit Buku Di Bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 171.

⁶⁾ Robert A. Dahl, *Demokrasi*, hlm. xiii.

untuk menyelamatkan dan memajukan perusahaan dan perniagaan miliknya, maka dari itu harus memiliki kekuasaan dalam pemerintahan dengan jalan menggunakan kekuasaan rakyat jelata. Untuk menggerakkan rakyat jelata, kaum borjouis memakai slogan yang cantik, yakni kemerdekaan (kebebasan), persamaan dan persaudaraan, yang dalam bahasa Perancisnya yaitu *Liberte, Fraternite, Egalite*.⁷⁾ Dengan demikian, rakyat pun bergerak menentang pemerintah otokrasi dan keruntuhannya ini lalu diganti dengan pemerintahan “demokrasi”.

- Pemerintahan demokrasi Barat tersebut sering disebut dengan demokrasi liberal, di mana konsep ini mempertahankan dan melahirkan borjouis-borjouis baru. Sistem demokrasi liberal ini adalah sistem di mana rakyat mengirim setiap wakilnya atau utusannya ke parlemen, sebab demokrasi yang landasan pergerakannya ini berdasar *liberte* (kemerdekaan/kebebasan) dalam bentuk pemerintahannya berupa sistem parlementer.⁸⁾

Posisi rakyat dalam sistem pemerintahan parlementer ini memiliki kekuatan (*power*) sekaligus budak yang sangat lemah posisinya. Kekuatan rakyat terletak pada hak untuk memilih wakilnya dalam parlemen dan bisa menarik dari kursi parlemennya. Parlemen ini memiliki legislatif yaitu membuat dan menetapkan berbagai peraturan maupun perundangan dalam kehidupan politik kenegaraan. Selain itu, fungsi lain yang penting adalah fungsi kontrol yaitu mengawasi kerja eksekutif

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 171-172.

⁸⁾ *Ibid.* Baca, Boyd R. Compton, *Kemelut Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton* (Jakarta: LP3ES, 1992).

dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Tetapi, pada saat bersamaan rakyat adalah manusia yang dieksploitasi kaum elit sebagai mesin produksi dalam memperkaya kaum borjouis dan dengan mudah dilemparkan ke atas jalan pengangguran.

Demokrasi yang lahir dan dipraktikkan di dunia Barat hanyalah untuk menyelamatkan dan mengembangkan modal. Demokrasi yang lahir dari sistem ideologi kapitalisme ini hanyalah untuk menindas dan mengeksploitasi sumber daya alam maupun manusia, dengan mengesampingkan aspek-aspek ruh (moral).⁹⁾ Menurut Soekarno, demokrasi Barat dengan sistem pemerintahan parlementer yang sering disebut dengan demokrasi liberal ini hanya memberi ruang gerak rakyat pada demokrasi politik saja dan ini belum dapat menyelamatkan rakyat dari kesengsaraan. Di samping itu demokrasi liberal tersebut adalah lahir dari sistem yang sangat individualistik dan hedonistik, dan hal ini dapat melahirkan permusuhan antar sesama bangsa karena tidak ada persatuan.¹⁰⁾

Demokrasi liberal (parlementer) didasari atas agresifitas kapitalisme (modal) dalam ekspansi industrialisasinya. Apabila Indonesia menerapkan demokrasi seperti ini maka jiwa Indonesia sama dengan jiwa kapitalisme-imperialisme, pada hal menurut Soekarno jiwa seperti itu baik kapitalisme asing maupun bangsa sendiri

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 172.

¹⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 173-179.

harus dihapuskan dan ditiadakan.¹¹⁾ Demokrasi yang diterapkan di Indonesia harus sesuai dengan nafas bangsa Indonesia yang berdasar atas budaya gotong-royong. Soekarno merumuskan konsep demokrasi yang memberi ruang kesempatan untuk partisipasi dalam politik dan ekonomi. Kalau demokrasi Barat memberi ruang kesempatan bagi rakyat hanya terbatas pada demokrasi politik, maka menurutnya sangat penting memberi peran bagi rakyat dalam demokrasi ekonomi. Jadi demokrasi politik sekaligus demokrasi ekonomi.¹²⁾

Demokrasi politik menurut Soekarno yaitu persamaan hak sebagai warga negara dalam segala aspek kehidupannya, di mana rakyat jelata dapat memilih dan dipilih. Sedangkan demokrasi ekonomi yaitu bahwa setiap individu tidak memiliki hak untuk mengakui segala sesuatunya milik pribadinya, karena “sesuatu” itu milik bersama dan dikelola bersama. Inilah yang membedakan antara Barat dan Indonesia, di mana konsep demokrasi politik Barat bertujuan untuk melindungi kekayaan pribadi, sedangkan demokrasi Indonesia melindungi kepentingan masyarakat (bersama).¹³⁾ Soekarno berkeinginan untuk menggabungkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.¹⁴⁾

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 181-186.

¹²⁾ *Ibid.*, hlm. 171-176, 187-192, 579-588.

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ *Ibid.*, hlm. 173-175.

Sejarah gagasan Soekarno tentang demokrasi seluruhnya bertema sentral tentang persatuan. Ideologi Pancasila dan konsep Nasakom yang digagasnya merupakan manifestasi keinginannya untuk selalu mempersatukan bangsa Indonesia. Maka dari itu, ia tidak setuju dengan demokrasi liberal dengan sistem parlementer seperti yang pernah diterapkan. Kerangka itu justru membuat bangsa dalam keadaan tidak menentu, bermusuhan satu sama lain, dan perjuangannya sangat sektarian. ✓

Latar belakang inilah yang mendasari penelitian dalam rangka skripsi ini. Selain itu adalah Soekarno merupakan tokoh yang pernah aktif di Sarekat Islam seperti M. Natsir, Agus Salim, Cokroaminoto maupun Karto Suwiryo. Ia juga pernah aktif di Muhammadiyah dan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam ilmu hukum Islam dari IAIN Yogyakarta dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Soekarno adalah tokoh politik yang paling legendaris dalam sejarah Indonesia kontemporer. Soekarno mantan Presiden Republik Indonesia yang pertama adalah merupakan ideolog dan politikus Indonesia yang telah banyak memberikan banyak kontribusi intelektual permanen bagi perkembangan pemikiran politik Indonesia.¹⁵⁾

Dan penelitian ini berusaha untuk meneliti lebih mendalam dan menemukan tentang konsep demokrasi Soekarno secara lebih utuh.

¹⁵⁾ Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir, Kemenangan Barisan Megawati Reinkarnasi Nasionalis Sekuler*, (Jakarta : Darul Falah, 1999), hlm. 2

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan di atas agar dalam pembahasan dan analisis tidak terlalu melebar dan meluas sehingga tidak sesuai dengan judul dan tujuan penulisan skripsi ini perlu pokok pembatasan masalah. Pokok masalah yang menjadi obyek kajian dan analisis ini dirumuskan dalam sebuah bentuk pertanyaan:

1. Bagaimanakah pemikiran Soekarno tentang demokrasi itu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang pemikiran Soekarno mengenai demokrasi.

2. Kegunaan

- a. Selain menambah khazanah kepustakaan yang telah ada tentang pemikiran politik, terutama tentang demokrasi nasionalisme, juga dapat menjadi referensi bagi mereka yang ingin tahu lebih jauh tentang pemikiran politik Soekarno.
- b. Dilihat dari sudut signifikansinya, penulisan skripsi ini diharapkan menjadi penting, sebab dengan mengenal dan memahami pemikiran politik Soekarno diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta dan mewujudkan solidaritas

bangsa yang kuat dan mengakar sebagai fundamen persatuan dan kesatuan bangsa-negara.

- c. Dilihat dari segi relevansinya, penulisan skripsi ini menjadi penting sebab persoalan demokrasi sedang menjadi wacana yang selalu didiskusikan dan didialogkan sampai saat ini. Hal ini terjadi karena pemerintah dan rakyat sedang terus-menerus mencari bentuk pemerintahan yang ideal untuk kelangsungan kehidupan negara Indonesia.

Bagaimanapun, gagasan-gagasan politik Soekarno terutama tentang demokrasi sangat penting untuk diteliti dan disampaikan kepada publik terutama kepada rakyat Indonesia agar adanya perbedaan tidak menjadikan perpecahan bangsa.

D. Telaah Pustaka

Sebagai tokoh yang kontroversial gagasan dan pemikiran Soekarno sangat menarik untuk dikaji. Sudah banyak karya ilmiah lahir dari intelektual dalam dan luar negeri yang membahas Soekarno dari berbagai perspektif. Namun dari berbagai karya ilmiah tersebut belum ada yang khusus membahas demokrasi yang akan dibahas dalam skripsi ini. Berikut akan kami uraikan beberapa karya yang membahas pemikiran Soekarno yang membuktikan keorisinilan skripsi ini

Pemikiran Soekarno diantaranya diteliti Isa Anshori dalam thesisnya di Universitas Mc. Gill yang berjudul “ *Soekarno And Kemal Attaturk a comparation vews: Regarding Relation Between State and Religion*”. Membicarakan

perbandingan konsep dan aplikasi sekularisasi Soekarno dan Kemal Attaturk. Dalam karya itu Isa Anshori berbicara tentang paradigma sekularisasi Soekarno dan Kemal Attaturk yang mempengaruhi pandangan mereka berdua yang memposisikan agama dalam kancah modernisasi dan perubahan sosial. Dalam thesis tersebut juga diteliti implikasi-implikasi konsep sekularisasi mereka berdua terhadap kebijakan yang diambil dalam menyikapi hal-hal yang dulunya dipegang institusi keagamaan. Kesamaan dan perbedaan sekularisasi yang dilakukan dua tokoh dari Indonesia dan Turki tersebut dijelaskan secara panjang lebar. Karya lain disusun oleh Badri Yatim "*Soekarno, Islam dan Nasionalisme*". Dalam buku ini lebih banyak menekankan pemahaman keIslaman Soekarno dikaitkan dengan paham kebangsaan.

Buku lain yang ditulis oleh H. Mangil Martowidjojo dengan judul "*Kesaksian Tentang Bung Karno 1945 - 1967*". Dalam buku ini diceritakan kehidupan Bung Karno dari hal yang kecil dalam kehidupannya sehari-hari sampai mengenai hal-hal penting yang dihadapi Bung Karno dalam mempertahankan negara Indonesia. "*Pengembaraan Batin Bung Karno*" yang ditulis oleh KH. Arman Arroisi yang menceritakan perjalanan hidup Bung Karno terutama dari segi keIslamannya. Dikisahkan pula beberapa pejuang kemerdekaan yang sangat dikagumi oleh Bung Karno dan yang sekaligus menjadi lawan politiknya.

Karya yang lebih dahulu adalah B. Dahm "*Soekarno and Struggle for Indonesia Independence*". Buku ini menganalisis secara komprehensif pemikiran dan perjuangan Sukarno. Buku ini juga mengungkap tahap-tahap perjuangan dan

sikap Soekarno yang terdidi dari tiga tahap yaitu tahap nasionalis (1926-1932), tahap marxis (1932-1934) dan tahap Islamis (1934-1940). Tokoh lain yang menulis tentang Soekarno misalnya, John De Legge "*Soekarno.: A Political Biograpy*", yang mengulas tentang sejarah kehidupan Sukarno.

M. Ridwan Lubis "*Pemikiran Soekarno Tentang Islam dan Unsur-Unsur Pembaharuan*" yang banyak membicarakan dan menganalisis pemikiran Soekarno tentang Islam. Cindy Adam yang diterjemahkan dalam judul "*Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat*", di mana buku ini banyak mengulas tentang pemikiran dan perjuangan Soekarno. Dari penelaahan pustaka yang dilakukan belum ada penelitian yang memfokuskan Soekarno sebagai tokoh Islam nasionalis yang dikaitkan dengan pemikiran demokrasinya. Karena itu karya-karya di atas akan dijadikan penyusun sebagai referensi sekunder dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun referensi primer adalah karya-karya Soekarno seperti tulisan-tulisannya yang terkumpul dalam buku *Di bawah Bendera Revolusi*. Adapun untuk mendapatkan gambaran tentang demokrasi dan mempertajam analisis akan menggunakan buku-buku lain yang membicarakan persoalan terkait.

E. Kerangka Teoritik

Al Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber pokok ajaran Islam sangat perlu untuk dimengerti secara mendalam. Sebab dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumner dari Al Qur'an dan Al-Sunnah ada dua perbedaan, yaitu pertama, yang

bersifat perintah (*commandment*), dan kedua adalah penjelasan (*solution*). Dalam banyak hal Al-Sunnah juga merupakan penjelasan dari Rasulullah atas suatu ketentuan yang ada dalam Al- Qur'an, disamping itu juga merupakan penjelasan dari Rasulullah atas pelaksanaan peraturan yang beliau inginkan dalam pemerintahan.¹⁶⁾

Dengan memahami ayat-ayat yang bersifat perintah dan penjelasan itu, maka kita akan benar-benar mampu melihat lingkup keluwesan dari karakter hukum Islam dalam bidang politik. Keluwesan itu merupakan ciri khas dari sistem perundang-undangan Islam dalam segala aspeknya, khususnya dalam bidang perundang-undangan dalam sistem politik.

Dalam teori Siyasyah Syar'iyah, nilai-nilai politik yang konstitusional itu pada hakekatnya terdiri atas :

- a. Musyawarah (*Al-Syura*)
- b. Keadilan (*Al-Adalah*)
- c. Kebebasan (*Al-Hurriyyah*), dan
- d. Persamaan¹⁷⁾

Penjelasan dari teori Siyasyah Syar'iyah ini yaitu, pertama ; bahwa musyawarah dalam prinsip perundang-undangan Islam dinilai sebagai lembaga yang sangat penting. Artinya, penentuan kebijaksanaan pemerintahan dalam sistem

¹⁶⁾ Mohamed S. El-Wa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, terj. Anshori Thajib, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983), hlm. 114..

¹⁷⁾ *Ibid.*

pemerintahan Islam haruslah didasarkan atas kesepakatan musyawarah. Oleh sebab itu, musyawarah juga merupakan prinsip penting dalam politik Islam. Artinya, dalam situasi apapun dan bagaimanapun keadaan umat Islam haruslah selalu bermusyawarah, sehingga dengan musyawarah ini kemaslahatan umat atas dasar prinsip musyawarah yang diidealkan oleh Islam dapat terwujud.

Kedua, keadilan ; agama Islam menempatkan aspek keadilan pada posisi yang amat tinggi dalam sistem perundang-undangannya. Tiada sistem yang begitu lengkap, kecuali Islam. Sistem itu tidak mengenal istilah baru atau kuno. Dan tiada bukti keadilan yang begitu kompleks, kecuali dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebab banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan berbuat adil dalam segala aspek kehidupan manusia. dan banyak pula ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan tentang masalah khusus, misalnya larangan bagi setiap orang berbuat curang serta menekan seseorang.

ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتأى ذى القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون¹⁸⁾

Tentang seruan berbuat adil dalam surah lain, Allah berfirman :

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها¹⁹⁾ واذا حكمتم بين الناس ان
تحكموا بالعدل¹⁹⁾

¹⁸⁾ An - Nahl (16) : 90

¹⁹⁾ An - Nisa (4) : 58

Serta masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan mengenai penegakan keadilan.

Ketiga, Kebebasan ; Islam mengakui adanya kebebasan berpikir, bahkan menjamin sepenuhnya dan dinilai sebagai hak dasar setiap manusia. Dalam sistem perundang-undangannya, Islam juga amat menghargai nilai-nilai kebebasan itu. Penghargaan sistem perundang-undangan Islam terhadap nilai kebebasan tidak dapat dibandingkan dengan sistem lainnya yang diciptakan oleh manusia.

Para sarjana bidang ilmu konstitusi modern memisahkan pengertian kebebasan itu dalam berbagai bagiannya. Misalnya kebebasan berpikir dan memeluk keyakinannya, hak memperoleh pendidikan, kekayaan serta kebebasan pribadi dan sebagainya. Bagian-bagian itu masih diurai lagi. Seperti yang tergolong pada bagian "hak kebebasan personal" : hak untuk hidup, hak memperoleh kemerdekaan dan keamanan bagi setiap orang serta kebebasan berorganisasi (berserikat). Akan tetapi, mungkin saja kebebasan berpikir merupakan akar dari semuanya. Sebab tiada seorang pun ragu akan adanya kebebasan berpikir dengan sistem politik suatu pemerintahan. Meskipun kebebasan berpikir dan berpendapat dijamin oleh Islam, namun bukan berarti kita boleh berpikir dan berbuat semaunya sendiri. Tentunya, prinsip kebebasan itu sendiri menjadi tidak patut kalau digunakan untuk menolak atau membantah kebenaran agama Islam. Atau bahkan melawan pendapat umum yang sudah dibenarkan dalam pemerintahan Islam.

Keempat, persamaan ; prinsip ini mengandung pengertian bahwa tiap individu dalam sebuah komunitas masyarakat mempunyai hak yang sama. Disamping itu pula mempunyai persamaan untuk mendapatkan kebebasan, tanggung jawab, tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi rasial, asal-usul, bahasa, dan keyakinan.

Prinsip persamaan itu bila dikaji dalam sistem hukum Islam dapat kita lihat ketika prinsip ini dijalankan pada pemerintahan Rasulullah SAW dan para sahabat (khalifah). Kemudian juga fakta-fakta yang bisa kita pelajari lewat Al- Qur'an dan Al-Sunnah. Dimana Rasulullah tidak membedakan cara memperlakukan masing-masing kabilah pada saat itu, kepada khalifah, rakyat biasa, beragama Islam atau yang beragama lain, akan dihadapkan pada peradilan yang sama jika mereka berbuat kejahatan. Dengan demikian tidak disangsikan lagi kekuatan prinsip persamaan itu dalam sistem hukum Islam. Pelaksanaannya berlaku menyeluruh dalam sistem hukum dan pemerintahan Islam.

Kaitannya dengan konteks ini, demokrasi merupakan sistem pemerintahan, dimana dengan sistem ini negara bermaksud mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan kata lain demi kemaslahatan umat. Dalam pengertian teori *Siyasah Asy-Syari'iyah*, demokrasi sebagai sistem politik yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sentrum utama sistem pengambilan keputusan publik suatu negara, yang merupakan sistem yang melembagakan kebebasan manusia dan menjamin hak-

hak dasar mereka untuk mewujudkan kemaslahatan umum atas dasar prinsip musyawarah seperti yang diidealkan oleh Islam.²⁰⁾

Demokrasi merupakan salah satu diantara sistem politik yang paling diminati dan paling dipercaya oleh mayoritas kelompok masyarakat di dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji verifikasi sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara faktual demokrasi juga telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil, egaliter dan manusiawi.²¹⁾

Dalam pengertian modern, demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan memiliki relasi kekuasaan yang ditentukan dan dikontrol oleh rakyat yang berdaulat. Demokrasi adalah sistem yang didalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat, karena itu secara universal demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (*Government of the People, By the People, For the People*).

Sebagaimana Ulf Shun Daussen yang dikutip Umaruddin Masdar dalam buku *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, bahwa semua sistem demokrasi menganut dua prinsip, yaitu kebebasan dan persamaan. Dari dua prinsip ini rumusan demokrasi kemudian dielaborasi dalam konteks definisi yang bersifat

²⁰⁾ Umarudin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 13

²¹⁾ *Ibid.*

terbuka untuk interpretasi, utamanya ketika menyangkut implementasi prinsip kedaulatan rakyat dalam praktek politik.

Tujuan paling hakiki dari demokrasi, dengan demikian adalah membentuk sebuah sistem yang apresiatif terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk, baik sebagai individu maupun anggota kelompok sosial, yang berdaulat dan bermartabat. Demokrasi baik sebagai sebuah sistem nilai kebudayaan maupun yang termanifestasi dalam struktur masyarakat, akan mencegah masyarakat yang otoritarian dan represif.²²⁾

Negara kita yang berlandaskan Pancasila. Demokrasi mempunyai posisi penting dalam sistem ketatanegaraan, karena telah mendapat pengakuan secara konstitusional dalam UUD 1945. Dalam sila keempat Pancasila, secara tegas disebutkan bahwa negara kita adalah berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan”.

Kehidupan demokrasi tidak hanya dalam pengertian formal seperti tersebut di atas, namun juga dalam arti aktual mencakup segenap aspek kehidupan warga negara dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian seluruh warga masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan suasana kehidupan yang lebih demokratis dalam wujud yang nyata berupa sikap dan perbuatan sehari-hari. Sikap dan perilaku anggota masyarakat merupakan cermin dari nilai-nilai yang tumbuh dan dianut oleh masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat

²²⁾ *Ibid*, hlm. 15.

dibentuk dari suatu proses sosialisasi nilai, termasuk nilai-nilai demokrasi yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat Indonesia, dapat dipupus dari proses sosialisasi melalui jalur-jalur tertentu, antara lain adalah agama atau tempat ibadah.²³⁾ Gagasan demokrasi secara umum mencakup tiga prinsip yaitu *liberte* (kemerdekaan/kebebasan), *egalite* (persamaan) dan *fraternite* (persaudaraan).²⁴⁾ Tiga prinsip demokrasi ini adalah konsep politik yang datang dari Barat yang bertujuan untuk menyuburkan modal yang bersifat agresif. Sedangkan menurut Soekarno, demokrasi harus bermuara pada persatuan atau berasaskan gotong royong.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada suatu penggalian data dan analisis yang memakai sumber kepustakaan (*library research*), yakni menjadikan bahan pustaka sebagai sumber utama (data primer), sehingga lebih sebagai analisa dokumenter (*documentary analysis*). Penelitian yang difokuskan pada analisa dapat diklasifikasikan dalam kategori historis-faktual, sebab obyek yang dianalisa adalah pemikiran seorang tokoh.

²³⁾ Hartono, "Agama Budha dan Nilai-Nilai Demokrasi", dalam Mashur Amin (ed.), *Agama, Demokrasi dan ..*, hlm. 70

²⁴⁾ Y.B. Sudarmanto, dkk., *Matori Abdul Djalil: Dari NU Untuk Kebangkitan Bangsa* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 153.

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipe penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Penelitian ini akan berusaha memaparkan atau menggambarkan biografi kehidupan dan pemikiran Soekarno yang berkaitan dengan gagasannya tentang demokrasi. Kemudian dianalisa dengan interpretasi tentang substansi pemikiran Soekarno tentang demokrasi dan aplikasinya di Indonesia serta bagaimana kaitannya dengan agama Islam yang dianggap signifikan. Pada akhirnya akan dijelaskan tentang bagaimana karakteristik dan mengapa wacana tersebut disosialisasikan oleh dirinya.

3. Pengumpulan Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer yaitu tulisan-tulisan Soekarno yang dicetak dalam bentuk buku berjudul *Di Bawah Bendera Revolusi* dan buku-buku yang secara khusus membahas pemikiran Soekarno, di antaranya Cindy Adam, *Soekarno Penyambung Lidah Rakyat*, dalam masih banyak lainnya sebagai sumber sekunder. Kemudian sebagai sumber pelengkap adalah buku-buku maupun tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan tema demokrasi guna mendukung pendalaman dan ketajaman analisis terhadap pemikiran Soekarno.

4. Analisis Data

Data-data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen induksi. Metode induksi adalah langkah analisis data dengan cara menerangkan beberapa data yang bersifat khusus untuk membentuk suatu generalisasi.²⁵⁾ Dalam penelitian ini, beberapa data atau variabel pemikiran Soekarno

²⁵⁾ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet.5 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 21.

tentang demokrasi yang bersifat khusus dianalisis dengan menjelaskan berbagai hubungan atau relasi dari berbagai variabel tersebut untuk disimpulkan sehingga memiliki sifat yang umum.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik, yaitu berpikir bertolak dari filsafat rasionalisme, bukan sekedar berpikir menggunakan rasio. Menurut rasionalisme, semua ilmu itu berasal dari pemahaman intelektual yang dibangun atas kemampuan argumentasi secara logik, dan bukan dibangun atas pengalaman empirik. Rasionalisme perlu didukung dengan data empirik yang relevan agar produk ilmu yang melandaskan diri pada rasionalisme memang ilmu dan bukan sekedar fiksi.²⁶⁾

Dalam konteks ini, pendekatan tersebut adalah sebagai proses membangun argumentasi secara logis terhadap pemikiran Soekarno tentang demokrasi dalam kiprah sosial politiknya di Indonesia. Disisi lain, metode pendekatan ini digunakan sebagai bahan kajian untuk mengkaji secara rasional mengenai latar belakang pemikiran dan memahami gagasan (pengalaman eksperimentasi politik) Soekarno berdasarkan data empirik yang dimiliki sehingga dapat diketahui bentuk dan gagasan pemikiran demokrasi dalam kiprah politiknya..

G. Tehnik Penulisan

Tata cara penulisan skripsi ini memakai landasan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah. Buku "Pedoman Penulisan Karyatulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga" (1999) inilah yang dijadikan pedoman penulisan

²⁶⁾ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, (Yogyakarta: Rake sarasin, 2000), hlm. 80.

skripsi ini, dan tidak menutup kemungkinan saran-saran atau masukan dari para pembimbing juga menjadi pertimbangan penulis untuk proses penyempurnaan.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu sebuah bab pendahuluan, sebuah bab mengenai biografi kehidupan Soekarno, sebagai tokoh Islam nasionalis, dan sumber pemikirannya. Disamping itu terdapat satu bab mengenai pemikiran Soekarno tentang demokrasi dan sebuah bab untuk menganalisis tentang pemikirannya mengenai demokrasi serta diakhiri pada bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

Bab I menyajikan pokok permasalahan yang ditempatkan dengan menguraikan terlebih dahulu secara singkat latar belakang penelitian ini. Selain itu juga berisi tentang pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, teknik penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab II memberi gambaran umum tentang biografi kehidupan Soekarno, dan posisi Soekarno sebagai tokoh Islam nasionalis, sumber pemikirannya yang mempengaruhi cara atau paradigma berpikir, serta konsepsi pemikirannya tentang ideologi politik. Hal ini sangat penting dalam sebuah penelitian tentang pemikiran seorang tokoh sebab ketika akan membahas dan menganalisis pemikiran tokoh tersebut harus mengetahui terlebih dahulu segala aspek yang berkaitan dengannya.

Bab III menguraikan pemikiran Soekarno yang menjadi benih-benih dalam gagasan pemikirannya terutama tentang demokrasi. Dalam hal ini yang akan diuraikan di sini adalah pemikiran Soekarno tentang idealitas demokrasi, yang berkaitan dengan pemikirannya tentang bentuk pemerintahan, suksesi dan pembagian kekuasaan. Adalah benar bahwa pemikiran Soekarno tentang demokrasi tidak hanya mencakup tentang suksesi, pembagian kekuasaan dan bentuk pemerintahan, tapi ketiga hal inilah menurut penulis yang mewarnai sistem demokrasi Soekarno.

Bab ini diharapkan dapat menjadi kerangka teoritik dalam mengembangkan argumentasi untuk menganalisis lebih cermat tentang aplikasi demokrasi yang ideal menurut Soekarno.

Bab IV merupakan bab analisis atau lebih dikerucutkan pada aplikasi dari sistem demokrasi yang ideal menurut Soekarno yang berkaitan erat dengan deskripsi serta analisa pada bab III. Bab ini menganalisis tentang asas gotong royong sebagai cerminan dari sistem pemerintahan Soekarno dan disamping itu menganalisa tentang pemikiran Soekarno mengenai hubungan antara agama dan negara yang berkaitan dengan konsistensi pemikirannya tentang demokrasi dalam dataran ide dan praktek karena beliau pernah menjabat sebagai presiden Indonesia.

Bab V adalah penutup. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Kesimpulan tersebut

tentang idealitas konsep demokrasi dan aplikasi demokrasi yang relevan di Indonesia menurut Soekarno dan diakhiri dengan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep demokrasi menurut Soekarno secara umum dapat disimpulkan bahwa sentral pemikirannya bermuara pada persatuan. Bab ini secara khusus menyimpulkan kajian dalam penelitian ini sesuai dengan pokok masalah yang diajukan dalam bab pendahuluan, yaitu tentang gagasan Soekarno mengenai demokrasi dan aplikasinya di Indonesia. Kesimpulan tersebut yaitu:

1. Gagasan Soekarno tentang idealitas konsep demokrasi yaitu tata sosial, politik dan ekonomi yang anti elitisme, kapitalisme dan imperialisme, serta memberi kesempatan kepada rakyat dalam peran politik dan ekonomi. Gagasan ini oleh Soekarno sendiri dinamakan sosio-demokrasi. Dimana aplikasi demokrasi yang relevan di Indonesia menurut Soekarno yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi asas gotong royong (persatuan) dalam membangun bangsa dengan sistem pemerintahan dipimpin atas dasar permusyawaratan/ perwakilan.

B. Saran-saran

1. Penelitian ini masih banyak kekurangan karena hanya meneliti pada salah satu aspek pemikiran Soekarno sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut dengan suatu referensi dan metodologi yang lebih komprehensif.

2. Bagi para teoretisi dapat mengkritisi dan mengembangkan hasil penelitian ini sdalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu politik.
3. Bagi para praktisi politik dapat mengaplikasikan konsep sosio-demokrasi Soekarno dalam praktik kenegaraan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku Tafsir / al-Qur'an ,

Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Departemen Agama, 1971.

B. Kelompok Buku dan Makalah Agama.

Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Teori Politik Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)*, Jakarta : Gema Insani, Press, 1996.

Badri Yatim, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Bakhtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Pratik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Daliar Noer, *Gerakan Islam Modern di Indonesia 1901-1945*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam Di Indonesia*, Jilid 2, Jakarta : CV. Anda Utama. 1992 / 1993.s

Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama; Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Ma'mun Murod Al-Brebessyi, *Menyingkap Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Agama dan Negara*, Jakarta : Rajawali 1999.

Muhamed S, El – Wa, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, Terj. Anshori Thajib, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1983.

M. Ridwan Lubis, *Pemikiran Soekarno tentang Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

M. Syafi'i Anwar, "Negara, Masyarakat dan Artikulasi Politik Islam dalam Orde Baru", *Republika*, 15 April 1993.

Mashur Amin (ed.), *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta : LKPSM, 1993.

Munawir Sadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran Islam dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, cet. 5, 1993.

Soekarno, "Apa Sebab Toerki Memisah Agama Dari Negara", *Pandji Islam*, No. 20, 20 Mei 1940

C. Kelompok Buku dan Makalah Lain.

- Ahmad Suhelmi, *Soekarno Versus Natsir*, Jakarta : Darul Falah, 1999.
- Alfian, *Politik, Kebudayaan dan Manusia Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Anhar Gonggong, "Tema Sentral Persatuan dan Alur Pemikiran Soekarno," Makalah pada *Seminar Sejarah Nasional IV* di UGM Yogyakarta, 16-19 Desember 1985.
- Afan Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, cet. 2, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000.
- Bernhard Dahm, *Soekarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, alih bahasa Hasan Basari Jakarta: LP3ES, 1987.
- Boyd R. Compton, *Kemelum Demokrasi Liberal: Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton* Jakarta: LP3ES, 1992.
- Cindy Adam, *Bung Karno: Penjambung Lidah Rakyat Indonesia*, alih bahasa Abdul Bar Salim, Jakarta: Gunung Agung, 1966.
- CST. Kansil, *Hukum Tata Neagara*, Buku I, Jakarta, Bina Aksara, 1986
- Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta : Gramedia, 1994.
- Herbert Feith, Lance Castles (eds.), *Indonesian Political Thinking 1945-1965*, London: Cornell University Press, 1970.
- , *Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001.
- Ismail Suny, *Pembagian Kekuasaan Negara*, cet. 2 Jakarta, Aksara Baru 1978.
- M. Natsir, *Capita Selecta*, Djakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, cet. 5, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Moh. Tolhah Mansoer, *Demokrasi Sepanjang Konstitusi*, Yogyakarta : Nur Cahaya, 1981.

- Muhammad Slamet, *Kembali Kepribadian Bangsa Indonesia*, Bandung: Pusat Penelitian Masyarakat UNPAD, 1960
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV, Yogyakarta : Rake Sarasin, 2000.
- Onghokham, "Soekarno: Mitos dan Realitas", dalam Taufik Abdullah (ed.), *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Robert A. Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Ruslan Abdul Ghani, *Pancasila Ideologi Pemersatu*, Jakarta: Pantjaka, 1962.
- Soekarno, "Saja Koerang Dynamis", *Pandji Islam*, No. 29, 22 Juli 1940
- , *Di Bawah Bendera Revolusi*, Jakarta: Panitia Penerbit Buku Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- , *Pancasila dan Perdamaian Dunia*, Jakarta: Haji Masagung, 1970.
- T.B. Simatupang, "Antara Cita dan Fakta", dalam Aristides Katoppo (ed.), *80 Tahun Bung Karno*, Jakarta: Sinar Harapan, 1982.
- U. Sundhausen, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI* Jakarta: LP3ES, 1986.
- Umarudin Masdar, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amin Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.
- W.F. Wessrtheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- YB. Sudarmanto, dkk., *H. Mathori Abdul Djalil: Dari NU Untuk Kebangkitan Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 1999.
- ZA. Maulani, *Demokrasi dan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: CRDS Kalimantan-Pustaka Pelajar, 2000.
- 30 Tahun Indonesia Merdeka 1945-1949*, Jakarta : Tirta Pustaka, 1981

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO.	BAB	HLM	FN	TERJEMAHAN
1	II	40	32	Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian rezki yang kami berikan kepada mereka.
2.	I	13	18	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, munkar dan bermusuhan. Dia memberi pengajaran agar kamu memberi pelajaran.
3.	I	13	19	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak dan (menyuruh kamu) jika menetapkan hukum diantara manusia, tetapkan dengan seadil-adilnya.

BIOGRAFI TOKOH

SOEKARNO

Nama kecilnya adalah Kusno Sosro Sukarno, karena badannya yang selalu sakit-sakitan membuat ayahnya mengganti namanya dengan Karno, Sukarno. Dia lahir dari pasangan Raden Sukemi Sosrodiharjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai yang keduanya adalah keturunan priyayi, pada tanggal 6 Juni 1901 di kota Surabaya,

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh Sukarno dimulai ketika ikut ayahnya di Mojokerto. Disinilah Ia masuk dan menyelesaikan studinya pada tahun 1914 di ELS (*Europese Lagere School*). Kemudian Ia dikirim ayahnya masuk HBS (*Hogere Burger School*) di Surabaya dan selesai pada tahun 1921 tepatnya tanggal 10 Juni. Kemudian melanjutkan lagi studinya di *Technisic School Bandung*.

Sukarno bukan hanya orator ulung, tetapi juga seorang penulis yang handal. Banyak tulisan-tulisannya dimuat dalam koran-koran pada saat itu. Adapun karya-karya Sukarno dalam bentuk buku diantaranya adalah : *Dibawah Bendera Revolusi* yang diterbitkan oleh panitia penerbit Jakarta pada tahun 1965, *Negara Nasional dan Tjita-Tjita Islam* yang merupakan kumpulan pidato di Universitas Indonesia pada tahun 1953. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan terakhir, beliau wafat pada tanggal 21 Juni 1970.

HOS. COKROAMINOTO

Nama kecilnya R.M. Oemar Said Cokroaminoto, beliau dilahirkan di kota Ponorogo pada hari senin tanggal 16 Agustus 1882. Dalam hidupnya beliau banyak berjuang. Perjuangannya dalam bidang politik tidak dapat dilepaskan dari Sarekat Islam (SI). Pendidikan formal yang pernah dilewati adalah OSVIA (*Opleidings School Voor Inlandsche Ambtenaren*) sebuah sekolah untuk calon pegawai Bumi Putera di magelang, lulus pada tahun 1902 selain itu beliau pernah masuk sekolah dan menyelesaikan di BAS (*Bugerlijke Avond School*) dan tamat pada tahun 1910.

Cokroaminoto ternyata tidak hanya sebagai orator atau organisator pergerakan saja, melainkan juga sebagai penulis yang tajam dan produktif. Hal ini karena Ia juga aktif dalam dunia pers. Diantara karya tulisnya yang sampai di tangan peneliti adalah *Islam dan Sosialisme*, *Tarikh Agama Islam* yang diterbitkan pada tahun 1955 oleh penerbit Bulan Bintang Jakarta, *Program Asas dan Program Tandhim Partai Sarekat Islam Indonesia*, dan *Reglement Umum bagi Ummat Islam* yang terdiri dari 69 halaman. Dan masih banyak lagi karya-karya lainnya, Beliau wafat di Yogyakarta pada tanggal 17 Desember 1934,